

BAB V KESIMPULAN

Penelitian Tentang LGBT sebagai sebuah gerakan di Asia Tenggara dengan studi kasus legalisasi hak LGBT Di Thailand yang merupakan salah negara di Asia Tenggara dengan jumlah komunitas LGBT yang besar diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan strategi gerakannya untuk mendorong lahirnya rancangan Undang-Undang tentang gender ketiga adalah dengan melakukan gerakan pada ruang lingkup Pemerintah di Thailand yakni dengan kerjasama antar komunitas LGBT dalam bentuk kampanye anti diskriminasi terhadap ekspresi seksual mereka di Thailand pada aspek pendidikan yakni menuntut persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan informal serta perlindungan bagi homoseksual laki-laki, perempuan dan transgender.

Kelompok LGBT juga bekerjasama dengan pemerintah Thailand melalui parlemen yakni Constitution Drafting Assembly (CDA) untuk menyusun Konstitusi Kerajaan Thailand secara permanen terkait dengan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga. Selanjutnya komunitas LGBT juga bekerjasama dengan Non Governmental Organization (NGO) dalam rangka melobi pemerintah Thailand melalui parlemen yakni Constitution Drafting Assembly (CDA) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga.

Secara gerakan sosial, komunitas LGBT membentuk relasi publik yakni “Sexual Diversity Network” yakni berupa pengajuan pengakuan kepada pemerintah Thailand untuk menerima komunitas LGBT sebagai kelompok seksual yang berbeda dengan masyarakat Thailand yang lain dengan melibatkan para advokasi yang diprakarsai oleh Kittinan Tharamatat dari Fah Si Roong untuk mengakui seksualitas yang beragam dan mengamankan persamaan hak untuk komunitas gay dimana hal tersebut harus ada dalam poin

Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga. Mereka juga menciptakan web site terkait dengan kebebasan ekspresi seksual komunitas LGBT di Thailand beserta tuntutan-tuntutannya pada pemerintah Thailand yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia.

Sedangkan secara edukasi, komunitas LGBT diketahui telah bekerjasama dengan universitas Mahidol dan Thammasat di Thailand yakni pada kegiatan jurnalisme dalam penciptaan artikel Bangkok Post yang membahas tentang pemberian kebebasan bagi kehidupan LGBT di Thailand sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang juga materi dalam Rancangan Undang-Undang Gender Ketiga serta mendorong pemerintah Thailand untuk mengeluarkan sanksi hukum bagi masyarakat Thailand atas perlakuan diskriminasi dan kriminalisasi yang dilakukan pada komunitas LGBT.

Komunitas LGBT di Thailand dalam rangka mewujudkan strategi gerakannya untuk mendorong lahirnya rancangan Undang-Undang tentang gender ketiga juga dicapai melalui gerakannya pada ruang lingkup internasional dimana beberapa komunitas seperti Anjaree, Sapaan, Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT), Bangkok Rainbow, dan Thai Transgender Alliance bekerjasama dengan PBB dengan OHCHR terkait dengan proses legalisasi Hak Asasi Manusia atas status mereka dan dengan UNDP untuk perlindungan hukum keberadaan mereka di Thailand dengan perantara NGO. Komunitas LGBT juga meminta OHCHR untuk mengadakan pertemuan khusus dengan pemerintah Thailand terkait dengan polemik LGBT sehingga dapat memberikan perlindungan hukum berupa pengawasan serta sanksi hukum terhadap tindakan diskriminasi seksual dan menjalin hubungan dengan UNDP untuk memajukan kesejahteraan komunitas LGBT di Thailand serta untuk mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender.